

TAJUK RENCANA

Elite Parpol di Pusaran Korupsi

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendalami dugaan keterlibatan petinggi parpol dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Hal ini disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat menjawab pertanyaan wartawan seputar keterlibatan petinggi parpol dalam kasus korupsi di Kementan (KR 9/12). Namun Ali tak menjelaskan lebih jauh petinggi parpol mana yang diduga terlibat korupsi di Kementan.

Seperti kita ketahui, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di Kementan. Dalam waktu hampir bersamaan Polda Metro Jaya juga menyidik kasus pemerasan terhadap SYL oleh pimpinan KPK. Hingga akhirnya Polda Metro Jaya menetapkan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka pemerasan. Namun sejauh ini belum ada penjelasan resmi apakah kasus pemerasan tersebut terkait dengan kasus korupsi SYL.

Logika hukumnya tentu berkaitan, namun untuk kasus yang mana kita belum tahu persis. Berdasar keterangan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, ada tiga klaster yang dilaporkan masyarakat, yakni pengadaan sapi, holtikultura dan pemerasan. Hal yang disebut terakhir ini sudah masuk penyidikan dan ada tersangkanya.

Lantas, kasus mana yang terkait dengan petinggi parpol? Kita tak hendak berspekulasi, meski sebelumnya sudah ada preseden. Bukankah sudah banyak petinggi parpol dijadikan tersangka? Tanpa kita sebut parpolnya, publik sudah paham bahwa korupsi yang

dilakukan petinggi parpol atau elite politik yang menduduki jabatan penting di pemerintahan atau lembaga negara selalu berdalih bahwa uangnya tak dinikmati pribadi melainkan untuk kegiatan parpolnya.

Hakim Agung Artidjo Alkostar (alm) pernah mengingatkan bahayanya korupsi politik, yakni para elite parpol yang menduduki jabatan publik yang menyalahgunakan kekuasaan. Sangat membahayakan karena korbannya rakyat, pelaku mengambil hak-hak rakyat dengan menggunakan sarana, kesempatan dan kekuasaan yang melekat pada dirinya.

Hanya saja, sejauh ini tak ada tindakan terhadap parpol yang korup, selalu saja sanksi ditujukan kepada oknum petinggi parpol yang melakukan korupsi, meski dananya diduga kuat mengalir ke parpol. Sudah banyak contoh kasus elite politik, baik yang duduk di institusi pemerintahan maupun legislatif, terlibat korupsi dan kasusnya dianggap selesai ketika yang bersangkutan dijatuhi pidana. Tak pernah kasusnya ditindaklanjuti hingga mengarah ke parpol.

Akankah dugaan petinggi parpol terlibat korupsi di Kementan berimplikasi pada parpolnya? Tentu ini tantangan yang harus dijawab KPK. Di satu sisi KPK harus menegakkan hukum secara objektif, di sisi lain lembaga antirasuah ini juga tak boleh terbang pilih. KPK tak boleh diskriminatif dalam penegakan hukum. Jangan hanya mengejar kader parpol tertentu saja, sementara kader parpol lain yang melakukan hal sama (korupsi-red) dibiarkan. Inilah tantangan riil yang dihadapi KPK saat ini. □f

Kampanye di Panggung Debat

KAMPANYE dan debat merupakan dua paket yang tidak dipisahkan dalam proses kontestasi politik. Keduanya sangat diperlukan kandidat untuk mempromosikan visi dan misinya ke publik. Kampanye biasanya lebih condong satu arah. Panggung pun dikuasai satu kandidat tanpa ada konfrontasi dari kandidat lain. Kampanye bisa dimana saja dan kapan saja sesuai yang telah ditentukan dan selama waktu masa kampanye.

Lain halnya dengan debat, debat biasanya terjadi beberapa kali saja di lokasi dan waktu yang telah ditentukan. Debat juga diatur oleh moderator sehingga ruang lingkup lebih terbatas. Kandidat juga tidak leluasa untuk mengeksplorasi seluruh program kerjanya. Debat di Pemilu 2024 tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Kandidat akan dipertemukan lima kali debat. Tiga kali debat capres dan dua kali debat cawapres sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

Memodifikasi

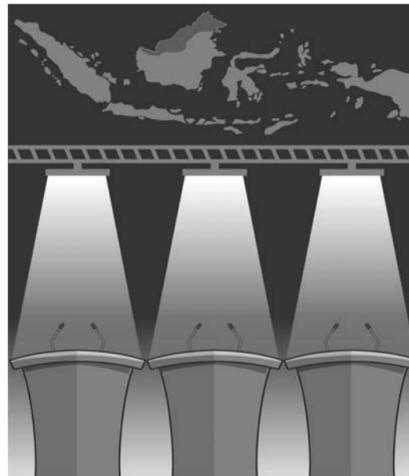
Namun baru-baru ini, KPU ingin memodifikasi bentuk debat capres-cawapres dengan menghilangkan debat cawapres. Artinya, debat cawapres tetap didampingi capres sehingga cawapres berpotensi tidak dominan dalam panggung. Lantas format yang diperbaharui oleh KPU memancing reaksi negatif publik. Publik menilai bahwa format debat lebih kepada perdebatan di ranah capres saja. Sementara cawapres tidak memiliki peran penting untuk memberikan gagasan secara mandiri.

Secara politik, cawapres akan lolos dari 'ujian publik' atas layak tidaknya menjadi orang nomor dua. Wacana menghilangkan debat cawapres telah memicu kekhawatiran atas kualitas cawapres masing-masing kandidat. Padahal, calon pemimpin harus mampu berdebat. Nelson Mandela pernah mengatakan seorang pemimpin yang baik dapat berde-

Aminuddin

bat dengan teras terang dan tidak setengah-setengah. Selain itu, posisi cawapres juga sangat penting dalam kontestasi politik. Cawapres bukan 'ban serep' tapi nomor dua yang memiliki andil besar dalam menjalankan roda pemerintahan.

Debat merupakan ajang kebolehan berbicara untuk meyakinkan pemilih. Dengan adanya debat, capres-cawapres



KR-JOKO SANTOSO

akan dinilai sejauh mana kepantasan calon untuk memimpin. Kefasihan dalam debat juga akan menjadi pertimbangan publik. Namun perlu dicatat bahwa menang debat belum tentu menang dalam pemilu. Kemenangan Hillary Clinton di debat capres menjadi salah satu referensi tidak menjamin kandidat menang. Justru Donald Trump lah yang terpilih menjadi presiden menggantikan Barack Obama.

Manfaat Debat

Terlepas dari polemik debat cawapres, debat calon memiliki beberapa bermanfaat. *Pertama*, manfaat bagi kandidat. Kandidat yang siap untuk berdebat tentu

akan memperoleh atensi dari publik. Kandidat bisa mengeksplorasi visi misi secara jelas. Kandidat juga bisa mengonfirmasi seluruh isu-isu miring atau kabar bohong jika ada yang merugikan dirinya, bisa beradu argumen dan data dengan kandidat lain.

Kedua, bagi publik debat merupakan salah satu instrumen untuk memperkuat pilihan politik. Meskipun debat tidak menjamin pemilih yang sudah menetapkan akan pindah haluan, namun setidaknya akan memperkuat referensi pemilih untuk memantapkan pilihan politiknya. McKinney & Warner (2013) menyebut bahwa mayoritas pemilih yang menyaksikan acara debat, sebagian besar tidak akan mengubah pilihannya.

Ketiga, manfaat bagi partai pengusung. Performa kandidat dalam debat tentu saja akan mempengaruhi partai pengusung. Kandidat capres-cawapres merupakan representasi dari partai pendukung. Selain itu pula, peserta pemilu bukan hanya capres saja. Namun juga partai politik.

Debat dalam ajang pilpres sangat penting untuk terus dilaksanakan. Debat harus menjadi tradisi agar demokrasi di Indonesia lebih matang. Debat tidak bisa hanya dilihat sebagai bagian dari 'kewajiban' melaksanakan amanat undang-undang pemilu. Debat capres-cawapres harus dipandang sebagai bagian dari kampanye politik kandidat. □f

**) Aminuddin, pemerhati politik dan demokrasi, Alumnus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Kemerosotan Lembaga Penegak Hukum

Pandu Irawan Riyanto

KRISIS institusional sedang melanda lembaga penegak hukum di Indonesia. Pimpinan-pimpinan pada lembaga Kepolisian, Kehakiman, dan terbaru KPK, terjerat kasus pelanggaran hukum. Sederet nama muncul. Ada Ferdysambo, Anwar Usman, Eddy Hiearij, Sudrajat Dimiyati dan Gazalba Saleh. Juga — menurut Jakasa Agung dalam rapat di DPR — jaksa-jaksa di daerah yang 'bermain'. Terbaru, Firli Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka pemerasan terhadap tersangka korupsi.

Kasus-kasus ini menggambarkan kemerosotan tajam lembaga penegak hukum. Lembaga yang diharapkan mampu bersikap netral dan berintegritas ternyata dipimpin dan di isi oleh orang-orang yang pragmatis, sewenang-wenang, dan cacat moral. Ini menjadi catatan kelam dalam perjalanan reformasi sejak 1998, yang salah satu tujuannya adalah menegakkan supremasi hukum. Sebab pada masa orde baru, sistem hukum bersifat represif sekaligus digunakan sebagai legitimasi rezim yang korup.

Supremasi Hukum

Secara umum, kondisi hukum di Indonesia saat ini telah memberikan peluang terjadinya praktik-praktik KKN serta distorsi dalam penafsiran yang hanya sesuai dengan kepentingan penguasa. Terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu, penegakan hukum belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah (Mahfid, 2019).

Supremasi hukum sebagaimana dicitakan saat reformasi itu sekarang mengalami putar balik seperti masa se-

Sosiologis

Secara sosiologis, hukum dapat dilihat sebagai salah satu elemen yang berfungsi sebagai stabilisator masyarakat. Sosiolog Amerika, Talcott Parsons mengatakan bahwa masyarakat dapat menjadi sistem sosial yang utuh (Ritzer, 2019). Keutuhan dan keharmonisan sosial ditopang dan dilegitimasi hukum dengan segala perangkat di dalamnya yang menjalankan fungsi integrasi sosial. Sebab, hukum akan mengatur pola tindakan masyarakat yang disertai dengan sanksi. Hukum memaksa individu (aktor) untuk bersikap konformis terhadap hukum-hukum tersebut. Disinilah kemudian terbentuk masyarakat yang patuh dan stabil. Oleh sebab itu,

peranan hukum amat penting dalam menciptakan integrasi sosial masyarakat. Kedudukan hukum dengan segala perangkat di dalamnya mulai dipertanyakan publik semenjak terjadinya banyak skandal belakangan ini. Maka hukum harus dikembalikan pada posisinya sebagai elemen yang independen dan netral. Jika tidak, tak menutup kemungkinan akan terjadi gejala sosial akibat penyelewengan hukum yang dilakukan aparat atau lembaga penegak hukum.

Tentu hal ini harus dihindari. Apalagi menjelang pemilu seperti sekarang, dimana tingkat kerawanan sosial tinggi akibat keterbelahan pemilih. Dibutuhkan hukum yang netral dan jauh dari konflik kepentingan untuk menjaga keutuhan sosial. Hukum yang adil akan memastikan terciptanya integrasi sosial masyarakat yang jauh dari konflik. □f

**) Pandu Irawan Riyanto, Mahasiswa Magister Sosiologi Universitas Gadjah Mada*

Pojok KR

Dewas KPK: Firli langgar kode etik.
-- Lebih berat ketimbang langgar hukum.

Korupsi di Kementan, KPK dalam keterlibatan petinggi parpol.
-- Dalihnya, tak terkait parpol.

Kepala BNN siap miskin bandar narkoba.
-- Bersiap sembunyikan kekayaan.
Berabe

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
@ pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55233. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Terimakasih Stasiun Yogya

PERJALANAN kemana saja dari Kota Yogya, sangat nyaman dengan menggunakan kereta api. Stasiunnya bersih, layanannya mudah dan tidak berbelit serta petugas pintu masuk pun ramah dan memudahkan. Sebagai lansia, saya merasa sangat terbantu ketika mau berangkat ke Bandung, beberapa waktu lalu. Setelah masuk dan ditanya tiket, dengan ramah petugas pintu masuk berkata : iibu bersediaikan untuk dipermudah? Jadi kita foto di sini dan nanti ibu bisa masuk tanpa harus antri dan tidak perlu menunjukkan tiket.!

Duh, mengapa situasi seperti ini tidak dari dulu-dulu ya, ketika saya banyak bepergian ke luar kota. Ini memang

pertamakali saya naik KA, setelah reformasi KAI. Karena dulu saya menganggap naik KA agak merepotkan karena domisili saya di Magelang. Namun kini melihat kelancaran di Stasiun Yogya justru membuat nyaman dan tenang.

Kini saya takjub. KA tidak desak-desakan, tidak ada yang duduk apalagi tidur di lorong, dan juga tidak ada pedagang hilir mudik yang antartasiun. Pedagang yang ada dari restorasi, yang bersih dan terstandar. Nyaman dengan kereta yang bersih, toilet pun bersih dan ada air. Terimakasih KAI, Terimakasih Stasiun Yogya. □f

**) Farida, Kedungsari Magelang Utara.*

Kedaulatan Rakyat
SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.
Alamat Percetakan: Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan: H Ishaq Zubaidi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Samarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil: Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil: Driyanto.
Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Sri Warsiti.
Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil: Asrul Sani.
Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guño Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP